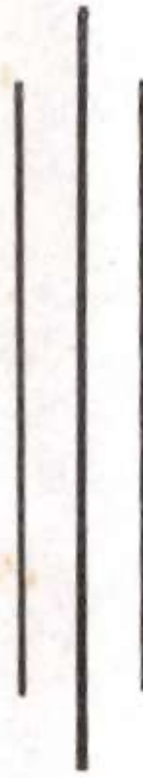




**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

**NOTA KEUANGAN
TENTANG RANCANGAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**



TAHUN ANGGARAN 1994/1995



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

NOTA KEUANGAN TENTANG RANCANGAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Yth. Sdr. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lamongan;

Yth. Sdr. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hadirin dan Sidang
Dewan yang saya hormati.

Dalam mengakhiri Tahun Anggaran 1994/1995, marilah kita sekalian terlebih dahulu menenangkan pikiran sejenak, untuk memanjatkan segenap puji dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas segala curahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga segala upaya dan karya kita bersama dalam melaksanakan pembangunan selama ini telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Sejalan dengan rasa syukur tadi, marilah kita sekalian membulatkan tekad untuk mengkonsentrasikan diri disertai kesungguhan dengan irama, dinamika dan semangat yang lebih tinggi untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan ini senantiasa dapat membuahkan hasil yang bukan saja semakin meningkat melainkan semakin merata ke segenap penjuru Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Dalam kesempatan ini, dengan suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan, saya merasa berbahagia oleh karena pihak Eksekutif dapat menyampaikan Nota Keuangan kepada Dewan Yang Terhormat untuk mengantarkan dan memberikan penjelasan terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang dituangkan dalam pasal 64 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

" Dengan Peraturan Daerah tiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran tertentu ditetapkan Perhitungan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya ".

Untuk memenuhi ketentuan dimaksud, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1994/1995 telah disusun dalam bentuk buku dan kelengkapannya dan telah disampaikan kepada Saudara Pimpinan Dewan dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 24 April 1995 Nomor 903/715/410.032/1995.

Apabila dilihat dari tenggang waktunya, saya tetap merasa optimis bahwa Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1994/1995 ini akan dapat diselesaikan secara paripurna dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian setelah dibahas oleh Dewan Yang Terhormat kemudian disepakati, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, hal ini dapat berarti pula bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1994/1995 dapat dipertanggung jawabkan baik secara formal maupun secara moral kepada masyarakat Kabupaten Lamongan yang kita cintai ini.

Hadirin dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan sistematika Nota Keuangan tentang Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1994/1995 dengan susunan sebagai berikut :

- I. Pendahuluan.
- II. Landasan Penyusunan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1994/1995.
- III. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1994/1995.
- IV. Penjelasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1994/1995.
- V. Kesimpulan.
- VI. Penutup.

I. PENDAHULUAN.

Hadirin dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1994/1995 yang sedang kita laksanakan Perhitungannya kali ini, adalah merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pertama dalam Pelita VI ini, dengan demikian sudah satu tahun kita menapaki Pelita VI sekaligus sebagai pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua.

Menyadari posisi pembangunan Daerah Tingkat II sebagai sub sistem pembangunan Daerah Tingkat I dan integral dengan pembangunan Nasional, maka pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan selalu diarahkan untuk mendukung, menunjang dan menyatu diri dengan pembangunan Jawa Timur dan pembangunan Nasional. Oleh karena itu strategi pembangunan Kabupaten Lamongan dalam setiap tahapan selalu konsisten dan berorientasi kepada pembangunan Jawa Timur dan pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaannya selalu diarahkan untuk mencapai tujuan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil sesuai dengan konteks Trilogi Pembangunan.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah, maka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lamongan senantiasa memprioritaskan program-program yang mampu memberikan jawaban atas permasalahan pokok daerah dengan memanfaatkan peluang pengembangan pembangunan di daerah, dengan bermodal keseluruhan sumber dan kekuatan daerah yang efektif dan potensial yang dimiliki dan dapat didayagunakan. Dalam pada itu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan secara umum telah membuahkan hasil yang cukup membanggakan, yang ditandai dengan adanya perubahan, dinamika dan perkembangan menuju tahapan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Hadirin dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1994/1995 ini terdapat 5 (lima) sektor utama yang mendapat alokasi besar, yaitu Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman, Sektor Transportasi, Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga, Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja dan Sektor Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan.

Sektor-sektor lain yang tidak memperoleh dana besar, tidak berarti prioritasnya kurang, namun perbedaannya disebabkan oleh kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan sektor-sektor yang memerlukan investasi fisik yang besar.

Pemberian Prioritas tersebut dapat dilihat dari besarnya dana yang diperuntukan pada setiap sektor dimana Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman mendapatkan dana yang paling besar. Pemberian prioritas tersebut sesuai dengan sasaran kegiatan sektoral terutama untuk pembangunan infrastruktur, dan prioritas daerah dalam pembangunan yang antara lain :

1. Mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi dalam REPELITA V dan potensi yang masih dapat dikembangkan, maka dalam REPELITA VI Daerah Kabupaten Lamongan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7 % per tahun dengan investasi sebesar 51 Milyar 717 Juta 509 Ribu 700 Rupiah.

Dari investasi tersebut terdiri dari dana yang berasal dari masyarakat direncanakan akan mencapai 26,5 % dari Pemerintah sebesar 73,5 %.

Untuk mendukung pertumbuhan sebesar 7 % tersebut diatas diperlukan peningkatan fungsi prasarana dan sarana yang telah dibangun/telah ada seefisien dan efektif mungkin, disamping pembangunan prasarana dan sarana baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan lebih tinggi antara lain pembangunan / peningkatan prasarana dan sarana perhubungan di pedesaan khususnya desa-desa tertinggal.

2. Pelaksanaan Program Pengentasan penduduk dari kemiskinan seiring dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan khusus dan langsung untuk dapat meningkatkan kegiatan pembangunan dalam rangka mempercepat pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu Inpres Desa Tertinggal harus tetap didukung oleh program/proyek yang selama ini sudah ada dengan lebih banyak memprioritaskan lokasinya di desa-desa tertinggal dibanding waktu-waktu yang lalu.

Demikian juga peningkatan partisipasi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam mengatasi penduduk dari kemiskinan perlu terus didorong dan dikoordinasikan lebih baik lagi.

Disamping itu perlu diprioritaskan pembangunan atau penyediaan prasarana dasar di desa tertinggal yang meliputi berbagai macam pembangunan prasarana berskala kecil.

Pelaksanaan prasarana dasar di desa tertinggal sedapat mungkin dilakukan oleh masyarakat sendiri dalam wadah LKMD. Tenaga Kerja, bahan baku pembangunan, dan peralatan yang digunakan diutamakan berasal dari desa itu sendiri, sehingga akan memberikan lapangan kerja dan pendapatan bagi penduduk desa setempat. Didalam pelaksanaan pembangunan prasarana tersebut, LKMD diberikan petunjuk dan didampingi secara khusus oleh tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Sistem tersebut dikembangkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran sekaligus yaitu :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana desa ;
 - b. Penguasaan teknologi pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut ;
 - c. Peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat di pedesaan.
3. Pembinaan kehidupan umat beragama seiring dengan peningkatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembinaan kehidupan beragama di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai luhur keagamaan baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui upaya untuk lebih memperdalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga terwujud manusia dan masyarakat yang mampu berperan dalam pembangunan.

Kerukunan antar umat beragama yang dinamis lebih dimantapkan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat, antara lain

melalui penyelenggaraan musyawarah antar umat beragama dan temu karya cendekiawan berbagai agama.

Peran serta umat beragama dalam pembangunan ditingkatkan melalui kegiatan sosial keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya agar segala kegiatan pembangunan betul-betul dirasakan sebagai tanggung jawab dan milik masyarakat.

Upaya peningkatan daya guna dan hasil guna prasarana ibadah sosial keagamaan, seperti zakat, Infaq, Sodakoh dan Wakaf dilaksanakan antara lain melalui pembinaan dan pengelolaan yang tepat bagi peningkatan kegiatan masyarakat dengan mendorong kesetiakawanan sosial sebagai bagian dari upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan.

II. LANDASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Mengenai landasan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1994/1995 tetap memperhatikan ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang ada antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri dan penerima Pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiunan Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Keuangan dan materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/pedoman tata Administrasi bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Adminstrasi Keuangan daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Bentuk dan susunan tata usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistim digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis tata usaha Keuangan Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan bentuk/contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara sisa perhitungan Anggaran dengan sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 13 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1994/1995 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Nomor 360/P Tahun 1994 tanggal 15 Juni 1994.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1994/1995.

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1994/1995.

Sdr. Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 13 Tahun 1994 dengan Volume tanpa Urusan Kas dan Perhitungan sebesar sebesar 29 Milyar 20 Juta 519 Ribu Rupiah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar 29 Milyar 20 Juta 519 Ribu Rupiah.
2. a. Belanja Rutin sebesar 12 Milyar 74 Juta 499 Ribu Rupiah.
b. Belanja Pembangunan sebesar 16 Milyar 946 Juta 20 Ribu Rupiah.

Sedangkan untuk Urusan Kas dan Perhitungan sebesar 19 Milyar 921 Juta 789 Ribu Rupiah baik pada sisi Pendapatan maupun sisi Belanja.

Dalam perjalanan selama satu tahun Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1994/1995 dilakukan Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 1994 dengan Volume tanpa Urusan Kas dan Perhitungan menjadi sebesar 33 Milyar 438 Juta 353 Ribu 300 Rupiah yang terdiri dari :

1. Pendapatan sebesar 33 Milyar 438 Juta 353 Ribu 300 Rupiah.
2. Belanja yang terdiri dari :
 - a. Belanja Rutin sebesar 13 Milyar 43 Juta 606 Ribu Rupiah.
 - b. Belanja Pembangunan sebesar 20 Milyar 394 Juta 747 Ribu 300 Rupiah.

Sedangkan untuk Urusan Kas dan Perhitungan sebesar 20 Milyar 747 Juta 624 Ribu 600 Rupiah baik pada sisi Pendapatan maupun Belanja.

Atas kekuatan/Volume Anggaran tersebut diatas, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasinya menunjukkan angka-angka sebagai berikut :

Pada sisi Pendapatan realisasinya sebesar 34 Milyar 2 Juta 479 Ribu 119 Rupiah 1 Sen, sedanga pada Sisi Belanja realisasinya sebesar 33 Milyar 415 Juta 52 Ribu 464 Rupiah 73 Sen, maka dapat diperoleh perhitungan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995 terdapat Sisa Lebih Perhitungan sebesar **587 Juta 426 Ribu 654 Rupiah 28 Sen.**

Adapun untuk Sisa Lebih Perhitungan tersebut, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Sisa Kas per 31 Maret 1995	: Rp. 611.023.524,41
b. Sisa UUDP tahun 1994/1995	: <u>Rp. 2.175.360,00</u>
Jumlah	: Rp. 613.198.884,41
c. Ditambah :	
Persekot yang belum disalurkan.	: <u>Rp. 185.425.995,16</u> Rp. 798.624.879,57
d. Dikurangi :	
Pihak ketiga yang belum disalurkan	: <u>Rp. 211.198.225,29</u>
Jumlah Sisa Perhitungan	: Rp. 587.426.654,28

Adapun realisasi Urusan Kas dan Perhitungan pada sisi Pendapatan sebesar 21 Milyar 481 Juta 41 Ribu 835 Rupiah 90 Sen sedang pada sisi Belanja realisasinya sebesar 21 Milyar 455 Juta 269 Ribu 605 Rupiah 77 Sen sehingga pada Urusan Kas dan Perhitungan terdapat selisih antara Pendapatan dan Belanja sebesar 25 Juta 772 Ribu 230 Rupiah 13 Sen.

IV. PENJELASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1994/1995.

Sdr. Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995 beserta Perubahannya, yang disusun dengan prinsip Anggaran berimbang antara Pendapatan dan Belanjanya setelah dilakukan perhitungan Anggaran sudah barang tentu terdapat adanya perbedaan-perbedaan antara perkiraan rencana dengan realisasinya baik dalam bentuk selisih lebih maupun selisih kurang. Terhadap selisih lebih pada Pendapatan Daerah berarti upaya kita untuk peningkatan Pendapatan Daerah dapat kita lakukan seoptimal mungkin sedangkan terhadap selisih kurang pada Pendapatan berarti kita masih perlu menginventarisasi permasalahannya sehingga tahun berikutnya untuk kita tingkatkan mendasari pada Potensi Daerah itu sendiri.

Adapun dalam kaitannya dengan Selisih Lebih terhadap Pengeluaran/Belanja menunjukkan adanya pelampauan plafond pengeluarannya. Sedangkan selisih kurang terhadap Pengeluaran/Belanja menunjukkan adanya upaya yang diwarnai adanya hasil guna dan daya guna yang berdampak positif pada Anggaran tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan yang saya kemukakan tadi untuk lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada sisi Pendapatan Daerah, target yang direncanakan sebesar 33 Milyar 438 Juta 353 Ribu 300 Rupiah dengan realisasinya sebesar 34 Milyar 2 Juta 479 Ribu 119 Rupiah 1 Sen sehingga terdapat selisih lebih sebesar 564 Juta 125 Ribu 819 Rupiah 1 Sen.

Sedangkan pada masing-masing Bagian Penerimaan dalam Pendapatan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU :

Rencana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dalam tahun anggaran 1994/1995 direncanakan sebesar 632 Juta 810 Ribu Rupiah, sedangkan Realisasinya sebesar 632 Juta 810 Ribu 437 Rupiah 94 Sen, sehingga terdapat Selisih Lebih sebesar 437 Rupiah 94 Sen.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu tersebut merupakan Sisa Perhitungan tahun 1993/1994 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1994 tanggal 19 Mei 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994.

2. PENDAPATAN ASLI DAERAH :

Dalam Pendapatan Asli Daerah yang terdiri empat Pos Penerimaan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah dan Penerimaan Lain-lain target yang direncanakan dalam tahun 1994/1995 adalah sebesar 3 Milyar 260 Juta 970 Ribu Rupiah, sedangkan realisasinya adalah sebesar 3 Milyar 324 Juta 900 Ribu 891 Rupiah 49 Sen sehingga terdapat selisih lebih sebesar 63 Juta 930 Ribu 891 Rupiah 49 Sen atau sebesar 1,96 %.

Dari masing-masing Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah :

Pajak Daerah dalam tahun 1994/1995 penerimaannya direncanakan sebesar 406 Juta 120 Ribu Rupiah sedangkan realisasinya adalah sebesar 391 Juta 782 Ribu 780 Rupiah, sehingga terdapat selisih kurang sebesar 14 Juta 337 Ribu 220 Rupiah atau tercapai sebesar 96,47 %. Selisih kurang tersebut disebabkan karena terdapat 5 (lima) Obyek Pajak yang realisasinya kurang dari target, yaitu :

- a). Pajak Pembangunan I.
- b). Pajak Bangsa Asing.
- c). Pajak atas Pertunjukan dan keramaian umum.
- d). Pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol.
- e). Pajak Penerangan jalan.

Yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Pajak Pembangunan I :

Pada Pajak Daerah tersebut telah dipungut berdasarkan potensi yang ada namun karena jumlah potensi dari obyek pajak tersebut yang mengalami penurunan sehingga realisasinya kurang dari target yang ditetapkan.

b). Pajak Bangsa Asing :

Tidak terpenuhinya target Pajak ini dari yang ditetapkan, oleh karena potensi Obyek (Orang Asing) di Kabupaten Lamongan berkurang, berhubungan telah pindah kewarganegaraan menjadi WNI.

c). Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum :

Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum ini terdapat selisih kurang sebesar 14 Juta 276 Ribu 605 Rupiah.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya obyek pajak, yaitu ; " Potensi Pertunjukan Tetap " hanya terdiri dari 4 Gedung Bioskop dengan harga tiket bervariasi antara Rp. 250,00 sampai dengan Rp. 900,00 dan jumlah penonton bervariasi antara 10 - 25 orang tiap kali putar.

Dan "Potensi Pertunjukan Tidak Tetap" sangat kecil dan hanya berlangsung musiman.

Kondisi semacam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kualitas pertunjukan bersaing dengan pertunjukan pada televisi yang menawarkan pilihan acara yang lebih menarik sehingga menurunkan minat masyarakat untuk menonton pertunjukan diluar rumah.

d). Pajak Minuman yang mengandung Alkohol :

Pajak Penjualan minuman yang mengandung alkohol, terdapat selisih kurang sebesar Rp.1.050.000,00 ; tidak terpenuhinya target Pajak ini merupakan konsekwensi dari kebijaksanaan atas larangan beredarnya minuman keras, dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

e). Pajak Penerangan Jalan :

Pajak baru yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 1994 sebagai pengganti Retribusi Penerangan Jalan Umum tersebut berlaku efektif mulai bulan Nopember 1994.

Kendala utama pemungutan Pajak ini adalah terbitnya surat dari Kuasa Pemimpin PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 5 Desember 1994 Nomor 8712/D.I/1994, yang menetapkan bahwa

terhitung mulai Bulan Desember 1994, pelekatan Pajak Penerangan Jalan maksimum 3 % dari rekening.

Selanjutnya untuk memungut kekurangan sebesar 4 %, maka berdasar Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1995 Nomor : 973/001/PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Januari 1995 Nomor 973/339/ 014/1995 diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1995, yang mengatur pemungutan atas kekurangan Pajak Penerangan Jalan sebesar 4 % dengan penaripan menurut klasifikasi pemakaian daya yang diikuti pemberian karcis/tanda pembayaran pajak dan berlaku efektif pada bulan Maret 1995 untuk tagihan Pajak mulai Bulan Pebruari 1995.

Sehingga dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan ini belum bisa terpungut secara keseluruhan.

Selanjutnya selain 5 Pajak Daerah yang kurang dari target, terdapat 7 Pajak Daerah yang lebih dari target yang ditetapkan yaitu Pajak Potong Hewan, Pajak Radio, Pajak Reklame, Pajak Anjing, Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, Pajak Pendaftaran Perusahaan dan Pajak Sarang Burung. Hal tersebut karena adanya Intensifikasi dalam pemungutannya.

b. Retribusi Daerah :

Retribusi Daerah dalam tahun 1994/1995 direncanakan sebesar 2 Milyar 615 Juta 400 Ribu Rupiah, realisasinya sebesar 2 Milyar 661 Juta 881 Ribu 740 Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 46 Juta 481 Ribu 740 Rupiah atau tercapai sebesar 101,78 %.

Dalam Pos Retribusi Daerah tersebut terdapat 17 Ayat yang melebihi target dan 12 Ayat yang kurang dari target yang ditetapkan.

Dalam 17 Ayat yang melebihi target tersebut yang menonjol adalah sebagai berikut :

- a). Retribusi Uang Leges, direncanakan sebesar 80 Juta Rupiah sedangkan realisasinya 91 Juta 33 Ribu 377 Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 11 Juta 33 Ribu 377 Rupiah hal ini didukung oleh upaya Intensifikasi dan penertiban terhadap petugas pemungut pada Dinas/Kantor/Instansi pemberi pelayanan masyarakat.

b).Retribusi Tempat Rekreasi, direncanakan sebesar 110 Juta Rupiah, realisasinya 270 Juta 713 Ribu 300 Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 160 Juta 713 Ribu 300 Rupiah, hal ini disebabkan karena adanya intensifikasi pemungutan dan juga semakin banyaknya pengunjung tempat pariwisata di Goa Maharani dan Tanjung Kodok, sebagai hasil berbagai kegiatan-kegiatan promosi wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada berbagai kesempatan. Sedangkan dari 12 Retribusi Daerah yang tidak memenuhi target yang menonjol diantaranya adalah :

a).Retribusi Pelelangan Ikan direncanakan sebesar 185 Juta Rupiah, realisasinya sebesar 120 Juta 489 Ribu 139 Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 64 Juta 510 Ribu 870 Rupiah hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Pelelangan Ikan seluruhnya disetor ke Kas Daerah Tingkat I Jawa Timur, sedangkan pembagiannya ke Tingkat II diberikan pada bulan berikutnya.

Selisih kurang pada Retribusi Pelelangan Ikan tersebut karena adanya keterlambatan pembagian dari Tingkat I yang akan diterima pada tahun anggaran 1995/1996 sejumlah 78 Juta 437 Ribu 501 Rupiah 8 Sen.

b).Retribusi Rumah Sakit dan Balai Pengobatan target yang direncanakan sebesar 487 Juta Rupiah, realisasinya sebesar 472 Juta 847 Ribu 530 Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 14 Juta 152 Ribu 470 Rupiah.

Tidak terpenuhinya target Retribusi ini oleh karena semakin pendeknya masa rawat pasien di RSUD yang semula rata-rata 5 hari pada tahun 1993/1994 menjadi 4 hari pada tahun 1994/1995.

c).Retribusi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) target yang direncanakan sebesar 30 Juta Rupiah realisasinya sebesar 18 Juta 998 Ribu Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 11 Juta 2 Ribu Rupiah. Tidak terpenuhinya target Retribusi ini oleh karena persyaratan pengajuan permohonan HO/SITU salah satunya harus dilengkapi dengan lampiran IMB, sedangkan pengusaha yang mengajukan permohonan HO/SITU pada umumnya belum memiliki IMB atau masih dalam proses penyelesaian.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah.

Yaitu Bagian Laba Perusahaan Daerah dengan target yang direncanakan sebesar 97 Juta 500 Ribu Rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 99 Juta 606 Ribu 776 Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 2 Juta 106 Ribu 776 Rupiah atau tercapai sebesar 102,16 %.

Selisih lebih tersebut berasal dari pelampauan target pembagian Laba Perusahaan Daerah Bank Pasar yang mengalami peningkatan terhadap Laba Usahanya.

d. Penerimaan Lain-lain

Dalam Penerimaan Lain-lain target yang direncanakan 141 Juta 950 Ribu Rupiah, realisasinya sebesar 171 Juta 629 Ribu 635 Rupiah 49 Sen, sehingga terdapat selisih lebih sebesar 29 Juta 679 Ribu 635 Rupiah 49 Sen atau tercapai sebesar 120,91 %.

Dalam penerimaan lain-lain tersebut selisih lebih yang menonjol adalah pada Ayat Penerimaan Lain-lain yang terdapat selisih lebih sebesar 28 Juta 674 Ribu 804 Rupiah 70 Sen, hal ini karena adanya penerimaan dari dana Pembangunan Daerah dari hasil TRI Kabupaten Lamongan tahun giling 1993 dan tambahan setoran Hak Guna Bangunan dari kompleks pertokoan Lamongan Indah.

3. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak target yang direncanakan sebesar 3 Milyar 367 Juta 411 Ribu Rupiah, realisasinya sebesar 3 Milyar 676 Juta 565 Ribu 306 Rupiah 88 Sen sehingga terdapat selisih lebih sebesar 309 Juta 154 Ribu 306 Rupiah 88 Sen.

Selisih Lebih pada Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak

Target yang direncanakan sebesar 3 Milyar 334 Juta 111 Ribu Rupiah, realisasinya sebesar 3 Milyar 608 Juta 307 Ribu 918 Rupiah 19 Sen sehingga terdapat selisih lebih sebesar 274 Juta 196 Ribu 918 Rupiah 19 Sen.

Selisih lebih tersebut yang terbesar adalah realisasi dari Pajak Bumi dan bangunan yang terdapat selisih lebih sebesar 263 Juta 694 Ribu 61 Rupiah dari target yang direncanakan sebesar 2 Milyar 940 Juta 111 Ribu Rupiah dan Penerimaan pembagian Pajak Kendaraan Bermotor yang terdapat selisih lebih sebesar 14 Juta 502 Ribu 857 Rupiah 19 Sen dari target yang direncanakan sebesar 390 Juta Rupiah sedangkan realisasinya sebesar 404 Juta 502 Ribu 857 Rupiah 19 Sen. Hal tersebut karena adanya Intensifikasi dalam pemungutan maupun penyeteraannya.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Target yang direncanakan sebesar 33 Juta 300 Rupiah, realisasinya sebesar 68 Juta 257 Ribu 388 Rupiah 69 Sen sehingga terdapat selisih lebih sebesar 34 Juta 957 Ribu 388 Rupiah 69 Sen.

Selisih Lebih tersebut sebagian besar karena adanya selisih lebih dari target yang direncanakan pada Ayat Pembagian Iuran Hasil Hutan sebesar 36 Juta 634 Ribu 515 Rupiah 4 Sen.

4. SUMBANGAN DAN BANTUAN

Sumbangan dan Bantuan terdapat selisih lebih sebesar 192 Juta 305 Ribu 182 Rupiah 70 Sen dari target yang direncanakan sebesar 25 Milyar 927 Juta 162 Ribu 300 Rupiah sedangkan realisasinya sebesar 26 Milyar 119 Juta 467 Ribu 482 Rupiah 70 Sen.

Selisih Lebih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumbangan.

Target yang direncanakan sebesar 8 Milyar 688 Juta 581 Ribu 300 Rupiah sedangkan Realisasinya sebesar 8 Milyar 775 Juta 385 Ribu 684 Rupiah, sehingga terdapat selisih lebih sebesar 86 Juta 804 Ribu 384 Rupiah.

Selisih lebih tersebut terdapat pada ayat Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara karena adanya kenaikan TPP Pegawai Negeri Golongan I dan II mulai bulan Januari 1995, dan pada Ayat Sumbangan/Bantuan bagian PBB Daerah Tingkat I Jatim yang diterima untuk bagian tahun 1993/1994 dan tahun 1994/1995 dan telah direalisasikan penyalurannya kepada Desa/Kelurahan.

b. Bantuan

Target yang direncanakan sebesar 17 Milyar 238 Juta 581 Ribu Rupiah, realisasinya sebesar 17 Milyar 344 Juta 81 Ribu 798 Rupiah 70 Sen, sehingga terdapat selisih lebih sebesar 105 Juta 500 Ribu 798 Rupiah 70 Sen.

Selisih lebih tersebut terdapat pada ayat Penerimaan bantuan pembangunan Dati II dan Ayat penerimaan bantuan/sumbangan untuk pembangunan khusus yaitu penerimaan bantuan proyek-proyek Sektoral P3KT.

5. PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH.

Pinjaman Pemerintah Daerah realisinya sebesar 248 Juta 735 Ribu Rupiah dari yang direncanakan sebesar 250 Juta Rupiah, sehingga terdapat selisih kurang sebesar 1 Juta 265 Ribu Rupiah.

Pinjaman tersebut merupakan realisasi Pinjaman SLAP pada tahun 1993/1994 yang realisasi pencairannya baru pada tahun 1994/1995, dan besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai kontrak proyek yang dilaksanakan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Adapun mengenai sisi Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Pembangunan plafond yang direncanakan sebesar 33 Milyar 438 Juta 353 Ribu 300 Rupiah, realisasinya sebesar 33 Milyar 415 Juta 52 Ribu 464 Rupiah 73 Sen sehingga terdapat selisih kurang sebesar 23 Juta 300 Ribu 835 Rupiah 27 Sen. Terhadap selisih kurang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. BELANJA RUTIN.

Pada sisi Belanja Rutin terdapat selisih kurang sebesar 82 Juta 989 Ribu 254 Rupiah 31 Sen, yakni selisih antara plafond yang direncanakan sebesar 13 Milyar 43 Juta 606 Ribu Rupiah dengan realisasi sebesar 12 Milyar 960 Juta 616 Ribu 745 Rupiah 69 Sen.

Untuk masing - masing Belanja Rutin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai :

Plafond yang direncanakan sebesar 8 Milyar 608 Juta 745 Ribu 540 Rupiah, realisasinya sebesar 8 Milyar 625 Juta 793 Ribu 698 Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 17 Juta 48 Ribu 158 Rupiah.

Kelebihan dari Plafond pada Belanja Pegawai tersebut disebabkan adanya kenaikan TPP Pegawai Negeri Golongan I dan II mulai bulan Januari 1995.

2. Belanja Barang :

Plafond yang direncanakan sebesar 1 Milyar 484 Juta 655 Ribu 110 Rupiah realisasinya sebesar 1 Milyar 473 Juta 69 Ribu 956 Rupiah, sehingga terdapat selisih kurang sebesar 11 Juta 585 Ribu 154 Rupiah.

Sisa tersebut merupakan sisa dana listrik, air minum, telepon dan sisa dana inventaris kantor yang tidak dipergunakan juga termasuk sisa dana barang cetak, alat-alat tulis yang tidak dipergunakan dalam rangka penghematan dana.

3. Belanja Pemeliharaan.

Plafond yang direncanakan sebesar 388 Juta 70 Ribu Rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 385 Juta 627 Ribu 912 Rupiah, sehingga terdapat selisih kurang sebesar 2 Juta 442 Ribu 88 Rupiah.

Sisa tersebut merupakan sisa dana pemeliharaan gedung, biaya pembelian bahan bakar, penggantian suku cadang kendaraan serta perbaikan mesin-mesin kantor dengan tanpa mengurangi frekwensi pemeliharaan untuk tetap mempertahankan mutu barang bagi kelancaran operasionalnya.

4. Belanja Perjalanan Dinas.

Plafond yang direncanakan sebesar 155 Juta 571 Ribu 500 Rupiah, Realisasinya sebesar 154 Juta 618 Ribu 505 Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 952 Ribu 995 Rupiah.

Sisa tersebut merupakan sisa dana perjalanan yang tidak dipergunakan karena disesuaikan dengan kegiatan tugas dinas yang ada.

5. Belanja Lain-lain.

Plafond yang direncanakan sebesar 1 Milyar 783 Juta 147 Ribu 100 Rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 1 Milyar 662 Juta 717 Ribu 554 Rupiah 69 Sen sehingga terdapat selisih kurang sebesar 120 Juta 429 Ribu 545 Rupiah 31 Sen.

Sisa tersebut merupakan sisa dana Biaya Jasa Pungut Pendapatan Asli Daerah yang tidak dipergunakan karena disesuaikan dengan realisasi pemasukan PAD dan juga Biaya Upah Pungut PBB yang disesuaikan dengan pengiriman transfer Upah pungut dari Pusat.

6. Angsuran Pinjaman.

Angsuran Pinjaman direncanakan 36 Juta Rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 35 Juta 886 Juta 150 Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 113 Ribu 850 Rupiah, hal tersebut disesuaikan dengan jumlah angsuran pinjaman yang dibayar.

7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan.

Plafond yang direncanakan sebesar 46 Juta 250 Ribu Rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 86 Juta 250 Ribu Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 40 Juta Rupiah.

Kelebihan tersebut disebabkan realisasi pembagian 10 % PBB dari Tingkat I Jawa Timur tahun 1993/1994 dan tahun 1994/1995 yang diterima dalam tahun ini dan telah diarahkan untuk Desa/kelurahan.

8. Pengeluaran tidak termasuk Bagian Lain.

Dalam tahun anggaran 1994/1995 Pengeluaran tidak termasuk bagian lain direncanakan sebesar 540 Juta 870 Ribu Rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 536 Juta 652 Ribu 970 Rupiah sehingga terdapat Selisih kurang sebesar 4 Juta 217 Ribu 30 Rupiah.

Selisih kurang tersebut merupakan sisa dana yang tidak dipergunakan yang disesuaikan dengan kegiatan yang ada.

9. Pengeluaran tidak tersangka.

Plafond yang direncanakan sebesar 296 Ribu 750 Rupiah, namun karena dalam pelaksanaannya pengeluaran yang bersifat mendesak masih bisa ditampung dalam pasal yang ada, sehingga dana tersebut tidak dipergunakan.

B. BELANJA PEMBANGUNAN

Pada sisi Belanja Pembangunan terdapat selisih lebih sebesar 59 Juta 688 Ribu 419 Rupiah yakni selisih antara plafond yang direncanakan sebesar 20 Milyar 394 Juta 747 Ribu 300 Rupiah sedangkan realisasinya sebesar 20 Milyar 454 Juta 435 Ribu 719 Rupiah 4 Sen.

Adapun untuk Belanja Pembangunan pada masing-masing sektor dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sektor Industri.

Dalam tahun anggaran 1994/1995 Sektor Industri plafond yang direncanakan sebesar 15 Juta Rupiah dan realisasinya sebesar 15 Juta Rupiah, sehingga tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.

Sektor Industri tersebut diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan Sentra Industri Kecil dalam peningkatan mutu design dan produksi sehingga memiliki daya saing dalam merebut pasar dalam dan luar negeri.

2. Sektor Pertanian dan Kehutanan.

Sektor Pertanian dan Kehutanan ini masih merupakan sektor andalan dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Lamongan. Dalam tahun anggaran 1994/1995 Sektor Pertanian dan Kehutanan mendapatkan alokasi dana sebesar 92 Juta 218 Ribu 500 Rupiah sedangkan realisasinya sebesar 91 Juta 783 Ribu 500 Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 435 Ribu Rupiah. Dalam Sektor Pertanian dan Kehutanan tersebut dialokasikan dalam Sub Sektor Pertanian Rakyat, Sub Sektor Perkebunan, Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan. Sedangkan selisih kurang sebesar 435 Ribu tersebut terdapat pada Sub Sektor Peternakan dimana sisa tersebut merupakan sisa dana kontruksi proyek yang tidak dipergunakan dan pengeluarannya disesuaikan dengan kegiatan yang ada.

Perlu pula disampaikan disini bahwa hasil-hasil pembangunan tanaman pangan telah menunjukkan peningkatan yang cukup meyakinkan, produksi padi pada akhir tahun 1994 mencapai 696.362 ton atau naik sebesar 3,18 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi perikanan pada tahun 1994 mencapai 5 ribu 972 ton atau naik 6 % dari produksi ikan tahun 1993. Sedangkan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Lamongan pada tahun 1994 mencapai sebesar 21 ribu 653 ton yaitu naik 17 % dari produksi perkebunan tahun sebelumnya.

Perkembangan sub sektor peternakan telah menunjukan hasil yang cukup berarti, untuk produksi daging sampai dengan bulan Desember 1994 ini telah mencapai 4.781.134 ton, sedangkan produksi telur mencapai 2.933.312 ton dan susu sebanyak 27.828 liter.

3. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.

Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi ini merupakan sektor yang sangat penting dalam rangka menggairahkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata melalui mantapnya iklim yang mendukung pembinaan dan peningkatan berusaha.

Dalam tahun 1994/1995, Sektor ini dialokasikan sebesar 1 Milyar 76 Juta 710 Ribu 750 Rupiah realisasinya sebesar 1 Milyar 75 Juta 918 Ribu 250 Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 792 Ribu 500 Rupiah.

Selisih kurang tersebut merupakan Sisa dana kontruksi proyek yang tidak dipergunakan, dan pengeluarannya disesuaikan dengan kegiatan yang ada.

Khusus mengenai proyek perluasan Pasar Sidoharjo yang dialokasikan sebesar 415 Juta 778 Ribu Rupiah, hal ini telah dapat terealisasi secara keseluruhan sehingga secara tuntas Pasar Sidoharjo telah dapat ditempati oleh seluruh pedagang sebanyak 1.308 pedagang pada tanggal 26 April 1995.

4. Sektor Transportasi.

Pembangunan Transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan tetap mendapatkan perhatian dalam rangka mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah guna lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Sektor Transportasi yang plafond direncanakan sebesar 5 Milyar 383 Juta 70 Ribu 450 Rupiah realisasinya sebesar 5 Milyar 365 Juta 724 Ribu 578 Rupiah 32 Sen sehingga terdapat selisih kurang sebesar 17 Juta 345 Ribu 871 Rupiah 68 Sen.

Selisih kurang tersebut terdapat pada Sub Sektor Prasarana Jalan karena adanya sisa dana kontruksi proyek yang tidak dipergunakan dan adanya sisa dana IPJK dan dana Bantuan Luar Negeri yang pembayarannya menyesuaikan dengan besarnya nilai kontrak yang ada.

5. Sektor Pertambangan dan Energi.

Dalam upaya meningkatkan sosial ekonomi di pedesaan melalui Sektor Pertambangan dan Energi pada tahun 1994/1995 dialokasikan dana sebesar 21 Juta 622 Ribu Rupiah yang realisasinya sebesar 21 Juta 622 Ribu Rupiah sehingga tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan tenaga listrik melalui PLTS bagi daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh Program Listrik Masuk Desa yang lokasinya berada di Dusun Cancing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang.

6. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah.

Dalam Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah Plafond yang direncanakan sebesar 481 Juta 276 Ribu 400 Rupiah realisasi sebesar 478 Juta 520 Ribu 775 Rupiah, sehingga terdapat selisih kurang sebesar 2 Juta 755 Ribu 625 Rupiah, yang merupakan sisa dana kontruksi Proyek yang tidak dipergunakan. Dalam sektor ini utamanya digunakan untuk pengembangan Produk/Obyek Wisata di Tanjung Kodok dan Gua Maharani Paciran guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, yang selanjutnya dalam sektor Pariwisata ini dapat menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga pendapatan masyarakat, daerah dan negara serta penerimaan devisa dapat meningkat.

Kegiatan dalam Sektor Pariwisata ini telah nampak jelas kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, melalui Retribusi Pariwisata dalam tahun 1994/1995 terealisasi sebesar 270 Juta 713 Ribu 300 Rupiah dari target yang direncanakan sebesar 110 Juta Rupiah.

Pengembangan terhadap Obyek Wisata ini akan terus ditingkatkan dalam tahun-tahun selanjutnya baik melalui dana dari APBD II, APBD I dan dari Pusat maupun kerjasama dengan Investor.

7. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.

Dalam tahun anggaran 1994/1995 sektor ini mendapat alokasi dana yang paling besar yaitu sebesar 6 Milyar 81 Juta 323 Ribu 950 Rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 6 Milyar 128 Juta 623 Ribu 989 Rupiah 2 Sen, sehingga terdapat selisih lebih sebesar 47 Juta 300 Ribu 39 Rupiah 2 Sen. Selisih lebih tersebut masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sub Sektor Pembangunan Kota mendapat alokasi sebesar 2 Milyar 148 Juta 98 Ribu 950 Rupiah, realisasinya sebesar 2 Milyar 199 Juta 108 Ribu 989 Rupiah 2 Sen sehingga terdapat selisih lebih sebesar 51 Juta 10 Ribu 39 Rupiah 2 Sen, selisih lebih tersebut karena adanya tambahan dana dari Pusat (Proyek Sektoral) terhadap 4 Proyek untuk kegiatan Perbaikan Kampung sebesar 62 Juta 547 Ribu Rupiah , yang masing-masing adalah Perbaikan kampung di Desa Bedahan Kecamatan Babat, Desa Blimbing Kecamatan Paciran, Desa Paciran Kecamatan Paciran dan Kelurahan Sidoharjo dan Desa Made Kecamatan Lamongan.

Disamping adanya selisih lebih tersebut, terdapat juga selisih kurang terhadap 21 Proyek sebesar 11 Juta 536 Ribu 960 Rupiah 98 Sen yang merupakan Sisa dana atau sisa kontruksi yang tidak dipergunakan.

- Adapun mengenai Sub Sektor Pembangunan Desa mendapat alokasi sebesar 3 Milyar 933 Juta 225 Ribu Rupiah realiasinya sebesar 3 Milyar 929 Juta 515 Ribu Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 3 Juta 710 Ribu Rupiah. Selisih kurang tersebut karena adanya 2 proyek yang terdapat sisa dana proyek atau sisa dana kontruksi yang tidak dipergunakan.

8. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

Guna mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan, agar menjamin tersedianya kebutuhan untuk generasi yang akan datang dalam Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang dialokasikan sebesar 404 Juta 780 Ribu 650 Rupiah realisasinya sebesar 403 Juta 929 Ribu 650 Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 851 Ribu Rupiah.

Dalam Sektor ini pada Sub Sektor Lingkungan Hidup dialokasikan sebesar 242 Juta 618 Ribu Rupiah dan telah terealisasi seluruhnya yang diarahkan untuk Program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui proyek Inpres Penghijauan dan dan Proyek Bantuan Gerakan Penghijauan Terpadu.

Dalam Sub Sektor Tata Ruang dialokasikan sebesar 162 Juta 162 Ribu 650 Rupiah, realisasinya sebesar 161 Juta 311 Ribu 650 Rupiah terdapat selisih kurang sebesar 851 Ribu Rupiah yang diarahkan untuk Proyek Penyusunan RUTRK/RDTRK Lamongan, Ibukota Kecamatan Ngimbang, Karanggeneng, Kedungpring dan Mantup.

Sedangkan sisa sebesar 851 Ribu Rupiah tersebut merupakan sisa dana proyek yang tidak dipergunakan dan pengeluarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

9. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga.

Plafond yang direncanakan sebesar 3 Milyar 468 Juta 86 Ribu Rupiah, realisasi sebesar 3 Milyar 475 Juta 943 Ribu 820 Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 7 Juta 857 Ribu 820 Rupiah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sub Sektor Pendidikan direncanakan sebesar 3 Milyar 396 Juta 86 Ribu Rupiah realisasinya sebesar 3 Milyar 404 Juta 64 Ribu 320 Rupiah, terdapat selisih lebih sebesar 7 Juta 978 Ribu 320 Rupiah.

Selisih lebih tersebut karena dalam proyek bantuan pembangunan dan pembinaan pendidikan Umum yang merupakan bantuan dari Instansi yang lebih tinggi direncanakan sebesar 5 Juta Rupiah realisasinya sebesar 13 Juta 200 Ribu Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 8 Juta 200 Ribu Rupiah. Realisasi tersebut adalah realisasi bantuan pembangunan dan pembinaan pendidikan umum di Kabupaten Lamongan yang diterima dari Tingkat I Jawa Timur dan Pusat yang telah disalurkan dalam tahun Anggaran 1994/1995, dan adanya sisa lebih tersebut karena adanya bantuan dari Tingkat I Jawa Timur untuk SMP Terbuka di Kecamatan Tikung, bantuan untuk paguyuban Tutor Kejar Paket B dan Paguyuban Paket A di Kabupaten Lamongan.

Disamping itu dalam Sub Sektor ini terdapat 2 Proyek yang mengalami selisih kurang sebesar 221 Ribu 680 Rupiah karena adanya sisa dana kontruksi proyek yang tidak dipergunakan.

- b. Sub Sektor Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa direncanakan sebesar 20 Juta Rupiah dan terealisasi seluruhnya yang dipergunakan untuk Proyek pembangunan Musium Budaya Jawa Timur.
- c. Sub Sektor Pemuda dan Olahraga direncanakan sebesar 52 Juta Rupiah realisasinya sebesar 51 Juta 879 Ribu 500 Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 120 Juta 500 Rupiah, hal tersebut karena adanya sisa dana yang tidak dipergunakan sesuai dengan DIP yang dikontrakkan atau realisasinya disesuaikan dengan kegiatan yang ada.

10. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Anak dan Remaja.

Plafond yang direncanakan sebesar 1 Milyar 645 Juta 71 Ribu Rupiah realisasi sebesar 1 Milyar 659 Juta 92 Ribu 180 Rupiah 70 Sen sehingga terdapat selisih lebih sebesar 14 Juta 21 Ribu 180 Rupiah 70 Sen. Selisih lebih pada sektor ini karena adanya 1 Proyek yang mengalami selisih lebih sebesar 14 Juta 750 Ribu Rupiah, yakni Proyek bantuan kegiatan sosial/bencana alam dari plafond yang direncanakan sebesar 55 Juta Rupiah sedangkan realisasinya sebesar 69 Juta 750 Ribu Rupiah, hal ini disebabkan karena adanya bantuan dari Instansi yang lebih tinggi untuk kegiatan sosial/bencana alam di Kabupaten Lamongan, dan realisasi tersebut telah disalurkan kepada yang berhak.

Disamping itu dalam sektor ini terdapat 4 Proyek yang mengalami selisih kurang sebesar 728 Juta 819 Ribu 30 Sen karena adanya sisa dana proyek yang tidak dipergunakan.

11. Sektor Agama.

Plafond yang direncanakan sebesar 60 Juta 200 Ribu Rupiah realisasi sebesar 83 Juta 669 Ribu 250 Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 23 Juta 469 Ribu 250 Rupiah.

Hal tersebut karena dalam Sektor Agama yang diarahkan pada proyek pengembangan Lembaga-lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah terdapat bantuan dari Pusat (Bantuan Presiden) maupun bantuan dari Tingkat I Jawa Timur untuk pembangunan/pengembangan Lembaga-lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah di Kabupaten Lamongan yang semula belum direncanakan. Dan realisasi tersebut telah disalurkan kepada yang berhak dalam tahun 1994/1995.

12. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

Dalam memenuhi kebutuhan data yang lengkap dan diandalkan, bermutu dan bermanfaat serta tepat waktu sebagai sumber informasi yang diperlukan bagi pembangunan, dalam Sektor Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi yang digunakan untuk proyek penggandaan buku Lamongan Memayu Raharjaning Praja Plafond direncanakan sebesar 17 Juta Rupiah, realisasinya sebesar 17 Juta Rupiah sehingga tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.

13. Sektor Hukum.

Guna semakin mendorong peningkatan penegakan hukum yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum, dalam Sektor Hukum yang dipergunakan untuk Proyek pembinaan Tata Usaha Negara dan penyuluhan hukum kepada masyarakat plafond yang direncanakan sebesar 7 Juta Rupiah sedangkan realisasinya sebesar 7 Juta Rupiah sehingga tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.

14. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.

Dalam sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan yang diarahkan bagi terwujudnya dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi serta langkah-langkah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, serta pembangunan Aparatur Pemerintah yang andal, profesional, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika peru-

bahan lingkungan, dengan terus menggalakkan pengawasan melekat secara manusiawi dalam tahun 1994/1995 direncanakan sebesar 1 Milyar 621 Juta 487 Ribu 600 Rupiah dan realisasinya sebesar 1 Milyar 610 Juta 707 Ribu 726 Rupiah sehingga terdapat selisih kurang sebesar 10 Juta 779 Ribu 874 Rupiah. Selisih kurang tersebut merupakan sisa dana proyek yang tidak dipergunakan dan sesuai dengan DIP yang dikontrakkan.

15. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa.

Plafond yang direncanakan sebesar 20 Juta Rupiah sedangkan realisasinya sebesar 20 Juta Rupiah sehingga tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang, yang diarahkan untuk proyek pembinaan Orpol dan Ormas sebesar 5 Juta Rupiah serta Proyek pembinaan kehumasan dan Media Masa sebesar 15 Juta Rupiah.

V. KESIMPULAN.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Atas dasar uraian dan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang antara lain :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar 587 Juta 426 Ribu 654 Rupiah 28 Sen.
2. Realisasi Pendapatan Daerah tanpa Urusan Kas dan Perhitungan sebesar 34 Milyar 2 Juta 479 Ribu 119 Rupiah 1 Sen dari yang direncanakan sebesar 33 Milyar 438 Juta 353 Ribu 300 Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 564 Juta 125 Ribu 819 Rupiah 1 Sen.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 3 Milyar 324 Juta 900 Ribu 891 Rupiah 49 Sen dari yang direncanakan sebesar 3 Milyar 260 Juta 970 Ribu Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 63 Juta 930 Ribu 891 Rupiah 49 Sen.
4. Realisasi Belanja tanpa Urusan Kas dan Perhitungan sebesar 33 Milyar 415 Juta 52 Ribu 464 Rupiah 73 Sen dari yang direncanakan sebesar 33 Milyar 438 Juta 353 Ribu 300 Rupiah sehingga terdapat selisih lebih sebesar 23 Juta 300 Ribu 835 Rupiah 27 Sen.

Realisasi masing-masing Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja Rutin sebesar 12 Milyar 960 Juta 616 Ribu 745 Rupiah 69 Sen.
 - Belanja Pembangunan sebesar 20 Milyar 454 Juta 435 Ribu 719 Rupiah 04 Sen.
5. Realisasi Urusan Kas dan Perhitungan untuk sisi Pendapatan sebesar 21 Milyar 481 Juta 41 Ribu 835 Rupiah 90 Sen dan Sisi Belanja sebesar 21 Milyar 455 Juta 269 Ribu 605 Rupiah 77 Sen.

VI. PENUTUP.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah keseluruhan uraian dan penjelasan mengenai Nota Keuangan tentang Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995 yang dapat saya sampaikan pada Sidang Dewan Yang Terhormat ini.

Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya atas kearifan dan kebijaksanaan Dewan Yang Terhormat, dengan harapan semoga dalam waktu yang telah dijadwalkan dapatnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

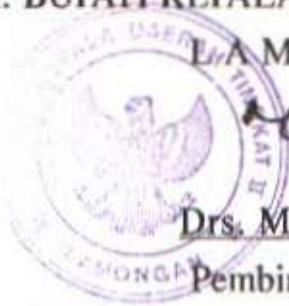
Sekian Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Lamongan, 8 Mei 1995

Pih. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

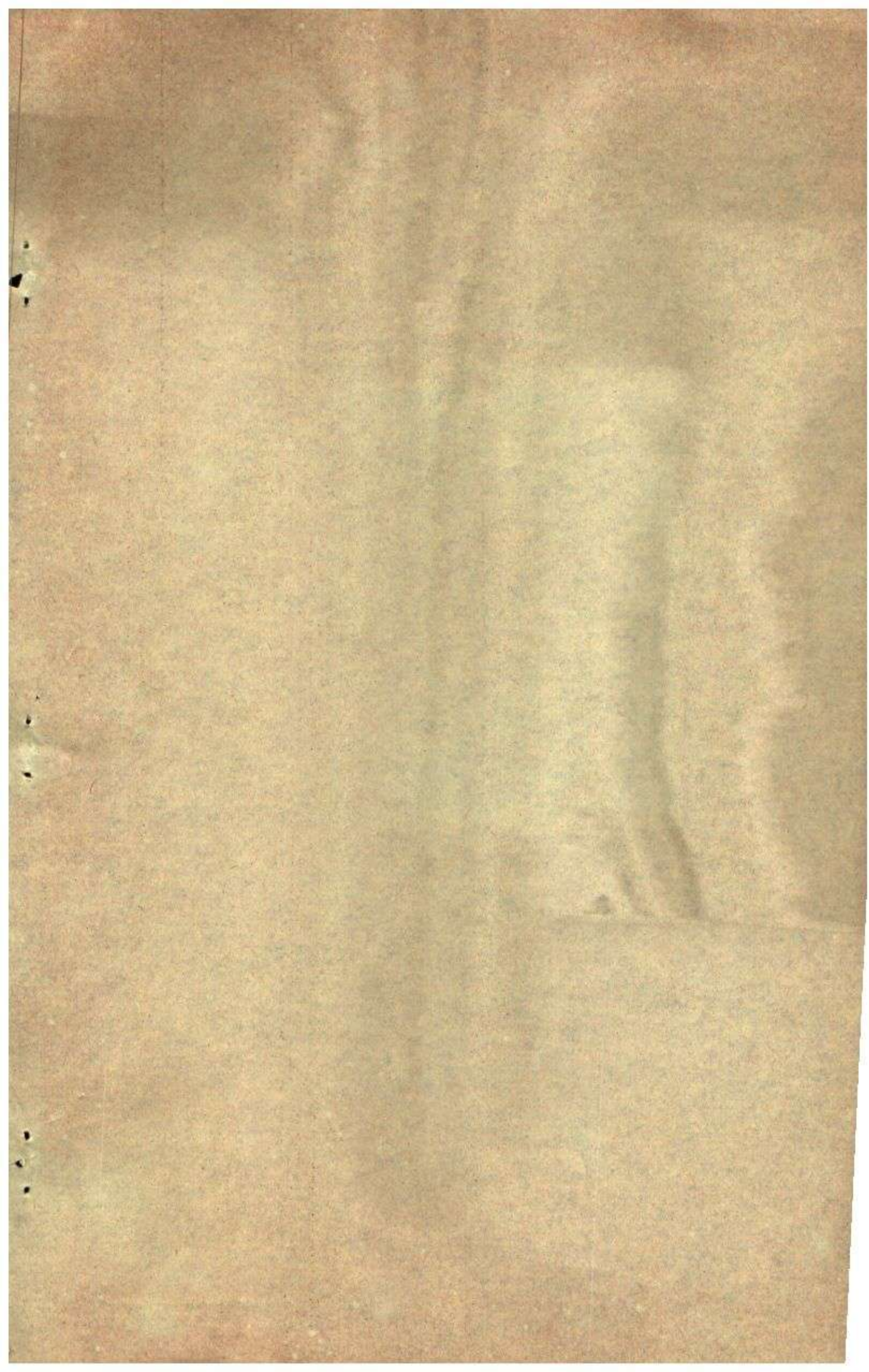
LAMONGAN



Marjono
Drs. MARJONO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 044 105.



**DAFTAR : REKAPITULASI PERHITUNGAN APBD
KABUPATEN DATI II LAMONGAN
TAHUN 1994/1995.**

No.	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN 1994/1995	REALISASI TAHUN 1994/1995
1	2	3	4
	<u>A. PENDAPATAN.</u>		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	632.810.000,00	632.810.437,94
2.	Pendapatan Asli Daerah	3.260.970.000,00	3.324.900.891,49
	a. Pajak Daerah.	406.120.000,00	391.782.740,00
	b. Retribusi Daerah	2.615.400.000,00	2.661.881.740,00
	c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	97.500.000,00	99.606.776,00
	d. Pos Penerimaan lain-lain	141.950.000,00	171.629.635,49
3.	Bagia Hasil Pajak / Bukan Pajak.	3.367.411.000,00	3.676.565.306,88
	a. Bagi hasil Pajak	3.334.111.000,00	3.608.307.918,19
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	33.300.000,00	68.257.388,69
4.	Sumbangan dan Bantuan	25.927.162.300,00	26.119.467.482,70
	a. Pos Sumbangan.	8.688.581.300,00	8.775.385.684,00
	b. Pos Bantuan.	17.238.581.000,00	17.344.081.798,70
5.	Penerimaan Pembangunan	250.000.000,00	248.735.000,00
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	250.000.000,00	248.735.000,00
	b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah	—	—
	JUMLAH PENDAPATAN :	33.438.353.300,00	34.002.479.119,01